

Analisis Pengelolaan Dan Realiasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai

Gabriela Florensia Bura

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

E-mail: gebybura@gmail.com

Maria Nona Dince

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Yoseph Darius Purnama Rangga

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa

Jl. Kesehatan No.3, Beru, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur

Abstract. *This study aims to determine and analyze the management and realization of the Shcool Operational Assistance (BOS) fund budget at SMPK Pancasila Lekebai. This study uses a type of qualitative research, where the data is obtained from direct observations to several informants interviewed and then analyzed the data acquisition and then drawn conclusions from the result of the interview, as well as other supporting documents related to the management and realization of the BOS fund budget. Data collection techniques are used through interview observation and documentation. Data analysis techniues are used through several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion withdrawal/verification. The results showed that the management and realization of the BOS fund budget at SMPK Pancasila Lekebai is in accordance with Juknis. Starting with the preparation of RKAS, the implementation of use in accordance with the components listed in the Juknis and shcool needs, until an accountability report is made. However, there is an obstacle that occurs in the lack of shcool committee supervision on reporting the use of BOS funds which is considered normal.*

Keywords: *Management and Realization of BOS Fund Budget*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPK Pancasila Lekebai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang mana perolehan datanya dari hasil pengamatan secara langsung ke beberapa informan yang diwawancarai lalu dilakukan analisa pada perolehan datanya kemudian ditarik kesimpulan dari hasil wawancara tersebut, serta dokumen pendukung lainnya terkait dengan pengelolaan dan realisasi anggaran dana BOS. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan melalui beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan realisasi anggaran dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan Juknis. Diawali dengan penyusunan RKAS, pelaksanaan penggunaan sesuai dengan komponen-komponen yang tertera pada Juknis dan kebutuhan sekolah, hingga dibuat laporan pertanggungjawaban. Namun terdapat kendala yang terjadi yaitu kurangnya pengawasan komite sekolah terhadap pelaporan penggunaan dana BOS yang dianggap biasa saja.

Kata kunci: Pengelolaan dan Realisasi Anggaran Dana BOS

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan sumber daya manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Mengingat sumber daya manusia merupakan salah satu aset nasional mendasar dan faktor penentuan utama bagi keberhasilan pembangunan, maka dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya untuk membangun seluruh masyarakat Indonesia seutuhnya harus memiliki landasan yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945 (Julantika, Supatmoko, & Kurrohman, 2017).

Upaya yang paling strategis dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah dengan melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting bagi Negara Indonesia, sebab dengan pendidikan kita dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...”. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas, sebab pendidikan akan berarti dan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bilamana pendidikan tersebut memiliki sistem yang berkualitas dan relevan dalam pembangunan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk memperoleh hak pendidikan yang sama yaitu dengan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu kebijakan Wajib Belajar. Wajib Belajar menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 18 adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Maksud dari tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat 2 tentang Wajib Belajar yaitu bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang

pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan cita-cita pendidikan nasional, sampai saat ini dihadapkan dengan berbagai permasalahan, seperti tingkat kualitas pendidik yang belum memenuhi standar mutu, sarana prasarana sekolah yang masih kurang memadai serta terbatasnya anggaran pendidikan yang disediakan oleh pemerintah, selain itu ada faktor eksternal yang merupakan tantangan yang paling berat bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang paling cerdas, unggul dan berdaya saing agar mampu berkompetisi pada tingkat global (Rohim, 2013).

Salah satu bentuk nyata pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan adalah dengan memberikan pendanaan pendidikan yang signifikan dari sumber alokasi dana minimal 20% dari APBN dan APBD sebagai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasional non personalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional non personalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana dan segala sumber daya yang ada dalam program BOS. Pentingnya pengelolaan dana BOS yaitu, dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dari program BOS dengan efektif dan efisiensi. Pengelolaan dana BOS yang baik merupakan keberhasilan sekolah dalam mengelola dana BOS, melalui suatu proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi (Sjioen & Ludji, 2020).

Sekolah Menengah Pertama Katolik Pancasila Lekebai merupakan sekolah yang berlokasi di Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka. Sekolah ini didirikan pada tahun 1977. Sebagai sekolah dengan akreditasi B, SMPK Pancasila Lekebai ini juga menerima dana BOS guna meningkatkan kualitas pendidikan yang bermutu. Berikut adalah data Laporan Dana BOS periode tahun 2020-2022:

Tabel .1 Laporan Dana BOS Periode Tahun 2020-2022

Tahun	RKAS	Penerimaan	Penggunaan	Saldo
2020	Rp.181.100.000	Rp.191.070.000	Rp.191.070.000	Rp.0
2021	Rp.198.000.000	Rp.196.350.000	Rp.196.350.000	Rp.0
2022	Rp.192.500.000	Rp.134.750.000	Rp.134.734.000	Rp.16.000

(Sumber Data Dana BOS SMPK Pancasila Lekebai Tahun 2020-2022)

Dari data tersebut diperoleh keterangan saldo akhir pada tahun 2020 dan 2021 sebesar Rp. 0. Saldo akhir pada tahun 2022 sebesar Rp. 16.000. Terdapat perbedaan penerimaan anggaran pada RKAS dikarenakan dana yang diterima pada penyusunan RKAS berbeda dengan realisasi penerimaan dana yang berdasarkan pada *cut off* depodik di periode yang ditentukan. Maksud dari *cut off* depodik adalah dimana sekolah diharuskan mngupdate data depodik paling lambat 31 agustus. Sinkronisasi data depodik ini sangat penting karena akan menentukan satuan pendidikan penerimaan dana BOS dan besaran alokasi dana BOS. Data depodik yang tidak akurat akan menyebabkan kurang salur atau lebih salur pada penyaluran dana BOS yang diterima. Sekolah juga harus menghabiskan alokasi dana BOS di akhir tahun sesuai RKAS yang telah dibuat karena akan berdampak pada pengalokasian ditahun berikutnya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bendahara BOS yaitu penyusunan RKAS yang sudah sesuai tetapi karena adanya keperluan urgensi sehingga menyebabkan beberapa dana yang telah disusun digeser untuk keperluan urgensi tersebut.

Berdasarkan uraian diatas mengingat pentingnya sekolah dalam mengelola dan merealisasikan anggaran dana BOS serta upaya sekolah dalam menyelesaikan hambatan yang ada untuk dapat tercapai tujuan pengelolaan dana BOS yang optimal, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan dan Realisasi Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SMPK Pancasila Lekebai”

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Teori stewardship menggambarkan situasi bahwa pihak manajemen tidak memiliki motivasi untuk tujuan individu, melainkan lebih tertuju pada sasaran utama untuk kepentingan organisasi. Teori stewardship merupakan teori yang dibangun atas asumsi mengenai sifat manusia, bahwa manusia secara hakikat dapat dipercaya, dapat berlaku dengan penuh tanggungjawab, mempunyai integritas, serta berlaku jujur kepada pihak lain (Davis, Schoorman, & Donaldson, 2018). Dalam teori stewardship, manajer akan melakukan upaya demi mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini didasari pada prinsip bahwa manajer memiliki tanggungjawab yang besar untuk mengelola sumber daya yang ada dengan cara yang bijak untuk kepentingan masyarakat luas.

Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran pihak sekolah sebagai institut yang dapat dipercaya, melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kepentingan sekolah, tepat, bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan yang diamankan, sehingga tujuan sekolah dan layanan sekolah serta program sekolah dapat dicapai secara maksimal dan sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Pengelolaan

Menurut Nugroho, (2003) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologis istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Sedangkan menurut George, (2009) mengemukakan bahwa pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Realisasi Anggaran

Menurut Mardiasmo, (2009) realisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncana atau diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang”

yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi *cash* atau piutang (*receivable*) yang melalui tahap penjualan.

Adapun pengertian realiasi anggaran menurut Munandar, (2012) adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan kegiatan anggaran (*budget*). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

Pendidikan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dikutip oleh Suwarno, (1992) adalah daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (ketekunan batin), pikiran (intelekt), dan jasmani anak-anak. Maksudnya ialah supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya dan masyarakat.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi satuan pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang disebut Dana BOS Reguler adalah Dana BOS yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional rutin satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan dasar dan menengah yang menjadi wewenang daerah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019), metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Oleh karena itu, penulis memilih menggunakan metode kualitatif agar penelitian dapat terarah lebih tepat sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan dan realisasi anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPK Pancasila Lekebai.

Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Sebagai salah satu ciri penelitian kualitatif dalam mengumpulkan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Oleh karena itu peneliti harus turun langsung untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan penelitian, peneliti menentukan objek penelitian di SMPK Pancasila Lekebai yang beralamat di Jl. Raya Maumere – Ende, Lekebai Desa Bhera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka dengan kurun waktu 17 Jun – 17 Agustus 2023

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data penelitian dipaparkan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Dalam penulisan ini diperoleh data yang secara langsung dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak langsung yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara, kemudian akan diolah oleh peneliti. Dengan dilakukannya wawancara akan diperoleh

informasi mengenai pengelolaan dan realisasi anggaran dana BOS yang ada pada SMPK Pancasila Lekebai.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2016) Sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari Laporan Dana BOS periode tahun 2020-2022.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

1. Wawancara
2. Dokumentasi
3. Studi Pustaka

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut (Sugiyono, 2019) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Dana BOS Pada SMPK Pancasila Lekebai

Pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh SMPK Pancasila Lekebai meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan merupakan proses awal dari suatu kegiatan sebelum melakukan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya, berisi rencana-rencana kegiatan yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun ke depan. Perencanaan dana BOS di SMPK Pancasila Lekebai yang diteliti diawali dengan proses penyusunan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) yang dalam hal ini mengacu pada petunjuk teknis yang ada.

Penyusunan RKAS diawali dengan berdasarkan kebutuhan sekolah. Proses penyusunan sendiri melibatkan kepala sekolah, bendahara BOS, komite sekolah dan orang tua siswa melalui forum rapat. Awalnya penyusunan dilakukan oleh sekolah berdasarkan kebutuhan sekolah. Setelah RKAS tersusun selanjutnya akan disosialisasikan kepada komite sekolah, guru, dan orang tua siswa untuk di mintai pandangan mengenai setiap item kebutuhan dan pengeluaran yang akan dilaksanakan. Kemudian komite sekolah di minta untuk menyetujui draft RKAS yang telah tersusun.

Berikut kesesuaian antara perencanaan dana BOS berdasarkan Junis dengan perencanaan dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai adalah sebagai berikut:

Tabel .2 Kesesuaian antara Perencanaan Dana BOS berdasarkan Juknis dengan Perencanaan pada SMPK Pancasila Lekebai

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Perencanaan dan penganggaran dana BOS disusun untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk RKAS	Sesuai	Sekolah membuat RKAS dalam satu tahun anggaran sebelum menggunakan dana BOS
2	Penyusunan dokumen RKAS dilakukan berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan dan hasil evaluasi diri pada profil satuan pendidikan	Sesuai	Sekolah menyusun RKAS berdasarkan kebutuhan sekolah dan berdasarkan rapor pendidikan
3	Penyusunan dokumen RKAS dilakukan melalui rapat penyusunan dokumen RKAS dengan melibatkan warga satuan pendidikan dan komite sekolah	Sesuai	Sekolah menyusun RKAS dengan melibatkan Kepala sekolah, bendahara, guru-guru, komite sekolah dan orang tua siswa
4	Penyusunan dokumen RKAS dilakukan untuk menentukan komponen penggunaan dana BOS	Sesuai	Sekolah menyusun RKAS dengan menentukan komponen penggunaan yang ada pada Juknis

Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini menunjukkan bahwa SMPK Pancasila Lekebai sebagai institut yang dapat dipercaya telah menjalankan tanggungjawab dalam hal tahap perencanaan telah sesuai dengan Juknis yang berlaku. Artinya bahwa adanya keterbukaan sekolah terhadap warga sekolah mengenai perencanaan anggaran dana BOS.

Pelaksanaan Dana BOS Pada SMPK Pancasila Lekebai

Pelaksanaan dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai diawali dengan pencairan dana BOS yang berdasarkan prosedur. Sekolah wajib menunjukkan dokumen-dokumen RKAS yang telah dibuat dan disetujui di Dinas lalu melakukan pencairan di Bank yang dilakukan oleh Kepala sekolah dan Bendahara BOS.

Jumlah dana BOS yang di terima oleh SMPK Pancasila Lekebai termasuk dana yang cukup besar namun apabila dibandingkan dengan penggunaan sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah dana tersebut masih dalam kategori belum cukup. Tetapi dalam pencapaian SMPK Pancasila Lekebai dengan adanya program dana BOS yang diberikan Pemerintah sudah sangat membantu kesejahteraan bagi Bapak/Ibu guru honor serta semua kegiatan dan kebutuhan sekolah dapat terpenuhi.

Penggunaan dana BOS telah sesuai dengan hasil rapat yang sudah disusun dalam perencanaan anggaran belanja. Perencanaan yang kurang lengkap ataupun terdapat perubahan, maka sekolah berhak membuat perubahan perencanaan yang kemudian di konfirmasi kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan penggunaan dana secara riil yang dilakukan oleh sekolah yaitu secara bersama dengan dana yang berasal dari komite, namun untuk dana BOS hanya dikhususkan membiayai kebutuhan sekolah.

Berikut kesesuaian antara pelaksanaan dana BOS berdasarkan Juknis dengan pelaksanaan dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai adalah sebagai berikut:

Tabel .3 Kesesuaian antara Pelaksanaan Dana BOS berdasarkan Juknis dengan Pelaksanaan Dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Penggunaan dana dilaksanakan oleh satuan pendidikan sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dana BOS yang telah disusun	Sesuai	Sekolah menggunakan dana BOS berdasarkan RKAS yang telah disepakati bersama
2	Setiap penggunaan dana BOS oleh satuan pendidikan dicatat secara lengkap	Sesuai	Sekolah mencatat secara lengkap setiap penggunaan dana yang berdasarkan komponen-komponen penggunaan dana

Hubungan teori stewardship dengan penelitian ini menunjukkan bahwa SMPK Pancasila Lekebai sebagai institut yang dapat dipercaya telah melaksanakan tugasnya terkait penggunaan dana BOS sesuai kepentingan sekolah sehingga tujuan sekolah dan layanan sekolah serta program sekolah dapat tercapai dan sesuai dengan Juknis yang berlaku.

Pelaporan Dana BOS Pada SMPK Pancasila Lekebai

Hasil pelaporan yang oleh SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan petunjuk teknis. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara BOS dilihat dari hasil dokumentasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS diketahui bahwa pelaporan dana BOS dilakukan oleh SMPK Pancasila Lekebai setiap semester (tahap 1 dan tahap 2) atau dua kali dalam satu tahun anggaran. Pelaporan dana BOS oleh SMPK Pancasila Lekebai di berikan kepada Dinas terkait, selain itu sekolah juga melaporkan pengelolaan dana BOS kepada warga sekolah. Pelaporan ini dibuat sebagai bentuk sekolah atas terlaksananya dana BOS SMPK Pancasila Lekebai kepada Pemerintah pusat. Namun yang menjadi kendala terkait dengan pengawasan komite adalah kurang adanya pengawasan komite sekolah terhadap pelaporan penggunaan dana BOS yang dinggap biasa saja.

Berikut kesesuaian pelaporan dana BOS berdasarkan Juknis dengan pelaporan dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai adalah sebagai berikut:

Tabel .4 Kesesuaian Pelaporan dana BOS bedasarkan Juknis dengan Pelaporan dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai

No	Pernyataan	Kriteria	Keterangan
1	Pelaporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan hasil pelaksanaan dana BOS	Sesuai	Sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban berdasarkan penggunaan dana
2	Bentuk dokumen laporan dan pertanggungjawaban tercantum dalam sistem aplikasi rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan yang diselenggarakan	Sesuai	Sekolah membuat laporan pertanggungjawaban sesuai dokumen yang tercantum dalam sistem aplikasi
3	Laporan pertanggungjawaban dana disampaikan oleh satuan pendidikan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh Kementerian	Sesuai	Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban melalui aplikasi

Hubungan teori stewardship dengan penelitian menunjukan bahwa SMPK Pancasila Lekebai sebagai institut yang dapat dipercaya telah bertanggungjawab dalam hal pengelolaan keuangan dana BOS yang diamanahkan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sekolah membuat pelaporan pertanggungjawaban dana BOS atas terlaksananya penggunaan dana BOS.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan Juknis. Anggaran yang disusun oleh sekolah berdasarkan atas kebutuhan sekolah. Rencana anggaran yang tersusun kemudian disosialisasikan bersama warga sekolah untuk dimintai saran pertimbangan mengenai penganggaran setiap item kegiatan dan kebutuhan yang akan dilaksanakan.
2. Pelaksanaan dana BOS oleh SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan Juknis. Diawali pencairan dana BOS yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara BOS dengan menunjukkan dokumen yang dibutuhkan oleh Bank penyalur. Penggunaan dana BOS oleh SMPK Pancasila Lekebai digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Meskipun dana BOS belum sepenuhnya cukup tetapi sudah sangat membantu mensejahterakan guru-guru honor dan kebutuhan sekolah dapat terpenuhi.
3. Pelaporan yang dilakukan oleh SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan Juknis. Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Bendahara BOS sebagai bentuk sekolah atas terlaksananya penggunaan dana BOS. Namun yang menjadi kendala terkait dengan pengawasan komite adalah kurang adanya pengawasan komite sekolah terhadap pelaporan penggunaan dana BOS yang dianggap biasa saja.

Saran

Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan realisasi dana BOS pada SMPK Pancasila Lekebai telah sesuai dengan Juknis. Oleh karena itu disarankan untuk terus mempertahankan sistem yang sudah tersusun dengan baik.
2. Terkait dengan pengawasan komite sekolah, diharapkan agar komite sekolah melakukan pemantauan tidak hanya pada saat rapat pleno saja, namun melakukan pengecekan pembukuan laporan yang dibuat oleh sekolah.
3. Diharapkan adanya transparansi terhadap penggunaan dana BOS yang ditempel pada papan pengumuman sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan warga sekolah dan masyarakat terhadap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. CV Alfabeta.
- Alya Elita Sjoen, S. R. L. (2020). : *Jurnal Inspirasi Ekonomi Vol. 2 No. 3_September 2020* ISSN: 2503-3123 (Online). 2(3), 12–18.
- Amin, E. K. (2015). *Pengantar Pendidikan*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Anis Watin Izzah, Y. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus Pada SMK Nurul Hikmah Tengguli Bangsri Jepara)*. 2, 98–108.
- Aurelia. P. N., Diliiana. M., Lamawitak. P. L., Sangga. K. P. 2022. Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Deteksi Fraud pada Air Minum Wair Pu'an Kabupaten Sikka. *Co-Creation: Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis*. Vol 1(3),119-127,2022.
- Bastian, I. (2007). *Akuntansi Sektor Publik*.
- Dani Rahman Hakim, D. S. (2020). *EVALUASI PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL*. 17(1), 11–23. <https://doi.org/10.25134/equi.v17i01.ABSTRACT>
- Davis, J., Schoorman, F., & Donaldson, L. (2018). Toward a Stewardship Theory of Management. *In Business Ethics and Strategy*, 437-500.
- Dea Evanda Mu'amarotul, Erma Puspita, S. (2023). *Kinerja anggaran bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar swasta*. 5, 80–84. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol5.art9>
- Dince, M. N. & Wengga, E. (2022). Analisis Pengendaliann Internal Persediaan Barang Dagang pada Sistem Perundangan Puspel Deosionalia. *Jurnal Accounting* . Vol.1,2022.
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten SIKKA Dtinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*.
- Fitri, A. (2014). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasa Negeri Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukit Tinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- George, T. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Gie, T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Liberty.
- Hakim, D. R., & Suhendra, D. (2020). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Menengah Kejuruan (Studi Komparatif Pada SMK Negeri dan Swasta di Provinsi Banten). *Jurnal Penelitian Pendidikan dan Ekonomi*, 11.
- Hendry Jaya, Hamidi, Sri Lestari, B. H. (2022). *Tinjauan realisasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah (bos) reguler tahun 2020 di smks plus kemilau bangsa* 2. 16(1), 44–53.

- Hidayah, D. E., Puspita, E., & Sugeng. (2022). Evaluasi Pengelolaan Dana BOS (Studi Kasus Pada SMA Bastren Darul Fatihin Badas). *SENMEA Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 572.
- Intan, T. P., & Zulkarnain, Z. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Sekolah Menengah Kejuruan Sukabumi. *JURNAL AKUNTANSI MALIKUSSALEH*, 156.
- Izzah, A. W., & Yanto. (2018). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Operasional Sekolah (BOS) (Studi Kasus Pada SMK Nurul Hikmah Tengguli Bangsari Jepara). *JURNAL REKOGNISI AKUNTANSI*, 98-108.
- Jaya, H., Hamidi, Lestari, S., & Hasibuan, B. (2022). Tinjauan Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun 2020 Di SMKS Plus Kemilau Bangsa 2. *Jurnal Akuntansi*, 44.
- Julantika, T., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus SDN Pringgowirawan 02 Jember). *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*.
- Kemendikbud. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan*.
- Mogot, T. F. (2023). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Sekolah Menengah Atas Negeri Olahraga Sidoarjo (SMANOR). *JURNAL REVENEU JURNAL AKUNTANSI*, 617.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Mudyahardjo, R. (2013). *Pengantar Pendidikan*. Raja Grafindo Persada.
- Munandar. (2012). *Pengertian Realisasi Anggaran*. Ilham Offset.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Elek Media Kompotindo.
- Nuryanti, A., Stefannie, D., Zhafarina, K., Deviyanti, D. R., Samben, R., & Sari, W. I. (2023). Kinerja Anggaran Bantuan Operasional Sekolah di Satuan Pendidikan Dasar Swasta. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 80-84.
- Pidarta, M. (1988). *Manajemen Pendidikan Indonesia*. Bina Aksara.
- Rahayuningsih, S. (2020). Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). *Alharma Jurnal Studi Islam*, 110.
- Rangga, Y. D., Herdi, H., & Mitani, W. (2020). Metode Altman Z-Skor Dalam Memprediksi Kepailitan Di Semua Koperasi Kredit Di Kabupaten Maumere. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- Rangga, Y. D., Herdi, H., Rangga, A., & Goo, E. E. (2020). Penetapan Jumlah Anggaran Dengan Metode Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Pada Pemerintahan Kabupaten Sikka. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

- Rohim, N. (2013). Mewujudkan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Penyelenggaraan Program Wajin Belajar. *ejournal.uika-bogor*.
- Sjieon, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *iE : Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 12.
- Standar Biaya Operasional Nonpersonalia Nomor 69 Tahun 2009*. (n.d.). Jakarta: Menteri Pendidikan Nasional.
- Sri Rahayuningsih. (2020). *Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Management of School Operational Assistance Funds (BOS)*. 1(2), 110–117.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&d*. CV Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suwarno. (1992). *Pengantar Umum Pendidikan (Cetakan Ke)*. PT. Rineka Cipta.
- Tabita Fristelina Mogot. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH ATAS*. 3(2), 617–624.
- Tia Putri Intan, Z. Z. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN 060864. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1(2), 1–13. <https://doi.org/10.29103/jam.v1i2.8307>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.). Jakarta: DPR RI.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003*. (n.d.). Jakarta: DPR RI.
- Winaya, I. M. A., & Dwijendra, U. (2022). *Analisis Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) Reguler dalam Program Merdeka Belajar*. 13(2), 133–144.